

PENILAIAN DAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2024

Muhammad Zulfa Alfaruqy^{1*}

¹Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro,
Jalan Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, Indonesia

¹Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Sleman, Indonesia

**zulfa.alfaruqy@gmail.com*

Abstrak

Pilpres tahun 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi elektoral Indonesia sekaligus menjadi kesempatan generasi Z sebagai pemilih baru dengan karakteristik psikososial yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penilaian dan partisipasi politik generasi Z dalam Pilpres tahun 2024. Penelitian menggunakan metode survei terhadap 500 mahasiswa generasi Z yang berdomisili di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi Z secara umum memberikan penilaian positif terhadap penyelenggaraan Pilpres, namun tetap kritis terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, isu netralitas presiden, serta manuver elite politik. Hal tersebut tidak menghalangi partisipasi mereka. Sebanyak 95% generasi Z menyatakan telah menggunakan hak pilih. Motivasi utama partisipasi adalah rasa tanggung jawab sebagai warga negara, dan kesadaran terhadap pentingnya kepemimpinan bagi masa depan bangsa, dan keinginan terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan otonomi dan keterkaitan. Sebaliknya, sebagian kecil yang tidak berpartisipasi mengemukakan alasan seperti kendala domisili dan sikap negatif terhadap pemilu, menunjukkan adanya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Selain itu, pilihan terhadap pasangan capres-cawapres tidak selalu sejalan dengan penilaian kritis terhadap dinamika politik. Generasi Z cenderung merasionalisasi pilihannya guna mereduksi ketidaksesuaian antara sikap dan tindakan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya determinasi diri dan konsistensi kognitif dalam menjelaskan perilaku politik pemilih pemula.

Keywords: Generasi Z; Pemilu Presiden 2024; perilaku memilih; psikologi politik; partisipasi politik

Abstract

The 2024 Presidential Election became a significant moment for Indonesia's electoral democracy as well as an opportunity for Generation Z—new voters with distinct psychosocial characteristics. This study aims to understand how Generation Z evaluated and participated in the 2024 Presidential Election. The research employed a survey method involving 500 Generation Z university students residing in Central Java. The results show that Generation Z generally gave a positive assessment of the election's implementation, though they remained critical toward the Constitutional Court's decisions, the issue of presidential neutrality, and the maneuvers of political elites. These concerns, however, did not discourage their participation. As many as 95% of Generation Z respondents stated that they had exercised their voting rights. The main motivations for participation were a sense of civic responsibility, awareness of the importance of leadership for the nation's future, and the desire to be involved in the democratic process—reflecting the fulfillment of autonomy and relatedness needs. Conversely, a small portion who did not participate cited reasons such as domicile constraints and negative attitudes towards elections, indicating barriers in fulfilling basic psychological needs. Moreover, their choice of presidential and vice-presidential candidates did not always align with their critical evaluations of political dynamics. Generation Z tended to rationalize their choices to reduce discrepancies between attitudes and actions. Overall, this study highlights the importance of self-determination and cognitive consistency in explaining the political behavior of first-time voters.

Keywords: Generation Z; 2024 Presidential Election; voting behavior; political psychology; political participation

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) menjadi momentum penting bagi perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia. Pilpres tahun 2024 mempertemukan tiga pasangan capres-cawapres dengan karakteristik personal dan basis dukungan yang beragam, yaitu Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud (Muhtadi, 2025). Pilpres juga menyuguhkan anomali hukum dan politik yang dinamis. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengubahan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden beberapa hari sebelum pendaftaran memicu perdebatan luas (Putra et al., 2024). Belum lagi indikasi cawe-cawe politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan agenda keberlanjutannya (Hamdi et al., 2024).

Anomali tersebut mendorong guru besar dan akademisi untuk bersuara. Sebagai contoh, civitas akademika Universitas Gadjah Mada, melalui petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024, menyerukan agar Presiden Jokowi kembali kepada koridor demokrasi (Grehenson, 2024). Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Padjadjaran, serta ratusan kampus lain menyusul dan menyuarakan keresahan serupa atas kondisi demokrasi Indonesia beberapa hari setelahnya. Di antara hiruk-pikuk tersebut, penting untuk memotret penilaian dan partisipasi politik generasi termuda yang terlibat dalam Pilpres 2024 dengan menggunakan perspektif psikologi politik.

Generasi termuda dalam Pilpres 2024 adalah generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 (Pew Research Centre, 2020). Mereka berusia antara 12 hingga 27 tahun pada saat Pilpres berlangsung. Dengan demikian, sebagian dari Generasi Z masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, sedangkan sebagian lain sudah menempuh pendidikan tinggi bahkan telah menapaki dunia kerja. Di dunia, jumlah mereka sekitar 1,8 miliar atau 24% dari populasi penduduk. Bagaimana di Indonesia? Merujuk pada Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah generasi Z mendominasi populasi dengan 27,94% atau sekitar 74,93 juta jiwa, disusul oleh generasi milenial (25,87%) dan generasi X (21,88%) (BPS, 2021). Di Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak setinggi persentase nasional, jumlah generasi Z juga mendominasi populasi penduduk dengan 25,31%, disusul oleh generasi milenial (24,93%) dan generasi X (22,53%) (BPS Jawa Tengah, 2021).

Terkait generasi Z di Provinsi Jawa Tengah, Alfaruqy (2024) melakukan penelitian tentang partisipasi politik generasi Z dalam Pilkada Gubernur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka menyerap informasi seputar pemilu dari dua sumber utama, yaitu orang terdekat terutama orangtua dan teman; serta media sosial terutama Instagram, TikTok, dan Twitter atau X. Ketika Pilkada berlangsung, mereka lebih banyak menyimak berita dan mendiskusikannya dengan orang terdekat. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, di luar dari konteks pemilu, keterlibatan politik mereka dimotivasi oleh dorongan kesadaran personal, efek politik yang dirasakan, penguatan lingkungan sosial, dan penghindaran ketidakpastian (Alfaruqy, 2023).

Pada Pilpres 2024, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang menjadi medan pertempuran politik yang sengit. Menurut data KPU (2023), Jawa Tengah adalah provinsi terbesar ketiga dalam hal jumlah pemilih, yaitu sebesar 28.289.413 pemilih. Jawa Tengah secara kultural identik sebagai kandang banteng, yaitu provinsi yang menjadi basis massa PDI Perjuangan (Syahadat et al., 2024). Pada kontestasi kali ini, PDI Perjuangan yang mencalonkan pasangan Ganjar-Mahfud berhadap-hadapan dengan Jokowi, kader partai sekaligus presiden petahana, yang diindikasikan kuat mendukung pasangan Prabowo-Gibran (Muhtadi, 2025). Indikasi tersebut sangat masuk akal apabila dibaca dengan kacamata relasi orangtua-anak, mengingat Gibran yang menjadi cawapres Prabowo tidak lain merupakan putra sulung dari Jokowi.

Pada tahun 2024, jumlah bantuan sosial lebih banyak dari beberapa tahun sebelumnya. Menariknya, Jokowi banyak melakukan pendistribusian bantuan sosial secara langsung di Jawa Tengah (Syahadat et al., 2024). Dalam kajian psikologi, dikenal dengan mekanisme kognitif berupa asosiasi relasional. Misalkan, orang mengasosiasikan si pemberi bantuan dengan kandidat yang terasosiasi secara dekat dengan si pemberi bantuan tersebut. Kondisi yang kompleks tersebut menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana sesungguhnya penilaian generasi Z, khususnya yang berdomisili Jawa Tengah, terhadap Pilpres kali ini.

Salah satu indikator keberhasilan dalam Pilpres tentunya partisipasi politik warga negara. Menurut Verba dan Nie (1972), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan personil pemerintah. Partisipasi politik merujuk pada kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik (*political participation*) adalah tindakan sukarela warga negara untuk mempengaruhi pemilihan pejabat negara, keputusan, dan pelaksanaannya.

Dalam sudut pandang psikologi politik, dikenal adanya aspek kognitif, afektif, dan behavioral (Cottam et al., 2022). Partisipasi politik lebih menonjolkan aspek behavior atau perilaku, meskipun aspek kognitif dan afektif yang ada di dalamnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Partisipasi politik dapat dimanifestasikan ke dalam banyak bentuk, mulai dari partisipasi konvensional yang menitikberatkan proses elektoral (misal memilih dan mengkampanyekan kandidat tertentu) hingga partisipasi non-konvensional yang tidak berhubungan langsung dengan proses elektoral (misal demonstrasi, penandatanganan petisi, dan penulisan blog politik). Dari beragam bentuk partisipasi politik tersebut, penelitian ini fokus memotret partisipasi politik berupa penggunaan hak pilih dalam Pilpres.

Penggunaan hak pilih dalam Pilpres dapat dikaji dengan Teori Determinasi Diri atau *Self-Determination Theory* (Deci & Ryan, 2012). Teori ini memandang bahwa individu digerakkan oleh motivasi intrinsik dan terkendali. Motivasi intrinsik (*intrinsic motivation*) mengarah pada karakteristik bawaan individu dan prototipe kebebasan psikologis atau determinasi diri. Sementara motivasi terkendali (*controlled motivation*) lebih mengarah pada kontrol eksternal dan cenderung menghasilkan perilaku yang dilakukan untuk menghindari perasaan negatif atau mendapatkan pengakuan eksternal (Deci & Ryan, 2012). Lebih lanjut, teori ini menjelaskan bahwa individu memiliki tiga kebutuhan dasar (Deci & Ryan, 2012). Pertama, otonomi (*autonomy*), yaitu kebutuhan individu untuk memilih dengan pilihan sendiri dan mengontrol perilakunya. Kedua, kompetensi (*competence*), yaitu kebutuhan individu untuk merasa mampu dan berhasil melakukan aktivitas tertentu. Ketiga, keterkaitan (*relatedness*), yaitu kebutuhan individu untuk merasa terhubung dan merasa memiliki dengan orang lain.

Sebagian besar penelitian terdahulu tentang partisipasi politik dalam Pilpres 2024 dilakukan pada sampel warga negara dari berbagai rentang usia dan generasi (Charta Politika, 2024; Indikator Politik, 2024; LSI, 2024). Hal tersebut penting, namun tidak menggambarkan detail per segmen generasi di wilayah tertentu. Sebagian besar penelitian juga dilakukan sebelum pemilu atau saat hari pemilu. Terbatas penelitian yang memberi jarak waktu untuk memberi ruang perenungan atau kontemplasi bagi warga negara atas dinamika politik yang dialami. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengoptimalkan perspektif psikologi. Padahal perspektif psikologi, khususnya psikologi politik, penting untuk melihat dinamika psikologis pada level mikro (Jaspal et al., 2016).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana penilaian generasi Z terhadap Pilpres tahun 2024? serta 2) Bagaimana partisipasi politik generasi Z dalam Pilpres tahun 2024, dan mengapa mereka (tidak) berpartisipasi? Penelitian ini bertujuan untuk memahami penilaian dan partisipasi politik generasi Z pada Pilpres tahun 2024. Secara teoretis, penelitian ini memiliki arti penting untuk memahami penilaian dan partisipasi politik dengan mendayagunakan perspektif psikologi. Secara praktis, penelitian ini memiliki arti penting untuk memberikan informasi tentang perilaku politik aktual generasi Z dalam konteks pemilu di tingkat nasional.

METODE

Penelitian ini melibatkan partisipan yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu generasi Z yang berstatus sebagai mahasiswa aktif dan berdomisili di Provinsi Jawa Tengah. Generasi Z memiliki posisi strategis sebagai pemilih muda dalam Pilpres 2024, serta dikenal sebagai *digital native* dengan pola perilaku politik yang khas. Pemilihan status pada mahasiswa aktif bertujuan untuk membatasi fokus penelitian pada segmen generasi muda terdidik. Sementara itu, Jawa Tengah dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, sekaligus menjadi medan pertempuran politik yang cukup menyita atensi publik.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei daring yang memungkinkan akses luas dan efisiensi waktu, serta sesuai dengan kebiasaan generasi Z dalam mengakses dan mengisi kuesioner secara digital. Survei terdiri dari beberapa pertanyaan tertutup dan terbuka terkait dengan penilaian terhadap Pilpres, partisipasi dalam Pilpres, alasan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, serta pilihan capres-cawapres. Pengumpulan data dilaksanakan delapan hingga sembilan bulan setelah pemungutan suara Pilpres, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2024 hingga 7 November 2024. Sebanyak 500 partisipan yang tersebar secara proporsional dari 13 daerah pemilihan (dapil) di Jawa Tengah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua strategi. Pertama, pertanyaan tertutup dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif guna menggambarkan distribusi frekuensi dan persentase jawaban partisipan. Kedua, pertanyaan terbuka dianalisis dengan menggunakan analisis tematik berdasarkan panduan Braun dan Clarke (2006) yang mencakup enam tahap, yaitu familiarisasi data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penulisan laporan.

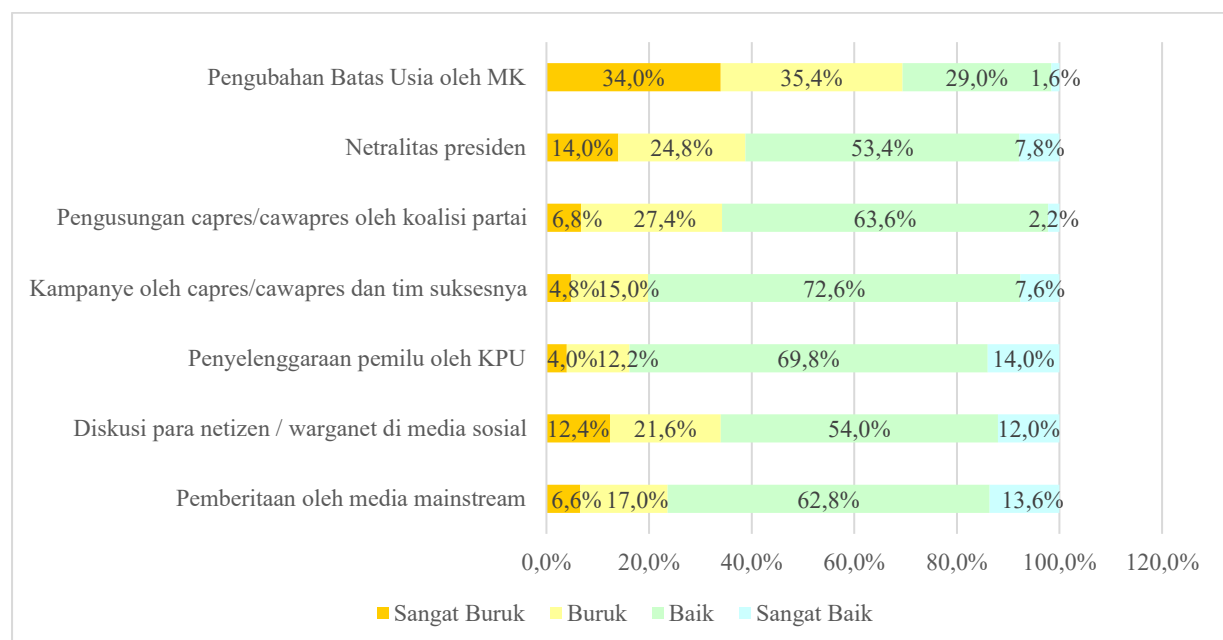
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian terhadap Pemilu Presiden

Penelitian ini menemukan penilaian generasi Z yang cukup positif terhadap penyelenggaraan Pilpres, meskipun terdapat penilaian yang kurang positif pada tindakan yang dilakukan oleh MK, presiden, elite politik, dan akar rumput (lihat Grafik 1). Penyelenggaraan Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan penilaian yang positif, di mana 69,8% partisipan menilai baik dan 14% menilai sangat baik, serta hanya sekitar 16,2% yang menilai buruk hingga sangat buruk. Kampanye yang dilakukan oleh capres-cawapres dan tim suksesnya juga cenderung dinilai positif, di mana 72,6% partisipan menilai baik dan 7,6% menilai sangat baik, serta hanya 19,8% yang menilai buruk hingga sangat buruk. Pemberitaan tentang Pilpres oleh media arus utama (*mainstream*) juga masih dinilai positif, di mana 62,8% partisipan menilai baik dan 13,6% menilai sangat baik, serta hanya 23,6% yang menilai buruk hingga sangat buruk.

Penilaian terhadap diskusi di akar rumput, khususnya yang terjadi di ruang digital, menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Meskipun 54,0% partisipan menilai baik dan 12,0% menilai sangat baik, sebesar 34% menilai diskusi warganet di media sosial buruk hingga sangat buruk. Penilaian yang terburuk muncul terhadap putusan MK. Pengubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh MK beberapa hari jelang pendaftaran dinilai mengandung muatan politis. Sebanyak 69,4% menilai buruk hingga sangat buruk, hanya 29% yang menilai baik, dan 1,6% yang menilai sangat baik. Dengan kata lain, 7 dari 10 generasi Z menilai persoalan terkait Pilpres sudah muncul sejak sebelum kontestasi lima tahunan tersebut dimulai. Penilaian kritis tertuju pada netralitas presiden, di mana hanya 7,8% yang menilai sangat baik dan 53,4% menilai baik, sementara 38,8% menilai buruk hingga sangat buruk. Hal relatif senada terjadi pada penilaian terhadap pengusungan capres-cawapres oleh koalisi partai, khususnya pimpinan partai sebagai pengambil keputusan, di mana hanya 2,2% yang menilai sangat baik dan 63,6% menilai baik, sementara 34,2% menilai buruk hingga sangat buruk.

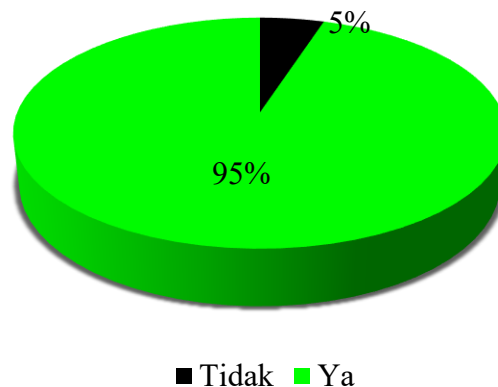
Penilaian generasi Z yang cukup positif terhadap KPU menunjukkan adanya kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Penilaian positif terhadap penyelenggara pemilu berkorelasi dengan kepercayaan politik (*political trust*) (Levi & Stoker, 2000). Meskipun demikian, Pilpres 2024 terlanjur diawali dengan anomali yang dinilai yang kurang baik, terutama karena terdapat indikasi kepentingan politik yang telah mengkooptasi lembaga penjaga konstitusi tersebut. Penilaian buruk dari Generasi Z terhadap putusan MK tentang pengubahan batas usia dapat dimaknai sebagai bentuk sinisme politik (*political cynicism*) (Huddy et al., 2013). Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan pada lembaga tersebut dan memicu polarisasi publik. Selain itu, generasi Z juga dapat membaca terdapat kasak-kusuk di kalangan elite politik dan ketidaknetralan presiden. Padahal, persepsi netralitas presiden penting dalam menciptakan pemilu yang adil dan bebas dari tekanan politik (Aspinall & Berenschot, 2019).



Grafik 1. Penilaian terhadap Pemilu Presiden

Partisipasi pada Pemilu Presiden

Penelitian ini menemukan bahwa Generasi Z memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi dalam Pilpres 2024. Sebanyak 95% partisipan mengaku telah menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024 (lihat Gambar 1). Persentase partisipasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pemilih aktual pada Pilpres, yaitu sebesar 81,48% (KPU, 2025). Indikasi partisipasi generasi Z ini juga dapat dilihat dari penelitian Evita (2023), yang mengungkapkan bahwa intensi partisipasi generasi Z berada di angka 88,78%.



Gambar 1. Partisipasi pada Pemilu Presiden

Tingginya partisipasi politik dalam Pilpres ini memberi sinyal bahwa generasi Z, khususnya yang berstatus sebagai mahasiswa, tidak seapatis yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan. Partisipasi elektoral generasi Z di Indonesia lebih menggembirakan daripada trend global (Barrett & Pachi, 2019). Pasalnya, sejumlah penelitian menemukan partisipasi elektoral generasi muda yang relatif rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih tua (Amoateng, 2015; Pontes et al., 2016; Sokol & Marcle, 2019). Barangkali yang perlu menjadi atensi ilmuwan psikologi politik adalah sejauh mana mahasiswa benar-benar paham dengan dinamika politik dan pilihan politiknya.

Motivasi Berpartisipasi

Sebanyak 475 dari 500 partisipan menyatakan telah berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih pada Pilpres. Dari 475 partisipan tersebut ditemukan lima kategori motivasi berpartisipasi. Pertama, menunaikan hak dan kewajiban warga negara (38%). Partisipan menyatakan bahwa motivasi menggunakan hak pilih dalam Pilpres adalah menunaikan hak dasar sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Setiap individu yang telah memenuhi syarat usia memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk terlibat dalam pemilu. Partisipan sadar bahwa hak pilih bukan sekadar kebebasan dalam menentukan pilihan, melainkan sesuatu yang harus dijalankan secara serius agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh negara.

“Karena memang sudah kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia yang sudah cukup umur untuk menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin negara.” (Partisipan nomor 22 atau P022)

“Karena sudah menjadi kewajiban dan panggilan hati saya untuk tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Menurut saya, menggunakan hak pilih adalah salah satu cara menunjukkan kepedulian dan tidak bersikap acuh terhadap bangsa.” (P231)

Kedua, menyadari pentingnya masa depan bangsa dan pemimpin yang baik (30%). Motivasi lain yang dominan adalah kesadaran bahwa suara mereka berperan penting dalam menentukan arah bangsa. Salah satu cara untuk menentukan arah bangsa adalah memilih pemimpin yang dianggap tepat. Kualitas pemimpin, seperti mengayomi, berintegritas, dan berpengetahuan

luas, akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat setidaknya hingga lima tahun yang akan datang. Hal tersebut mencerminkan orientasi ke masa depan dan kepedulian terhadap arah kebijakan negara.

“Kalau dari saya pribadi, satu suara dari saya itu menentukan 5 tahun Indonesia ke depan. Memang anak-anak muda adalah salah satu indikator yang penting, dan sebenarnya anak muda harus paham isu politik. Tetapi anak muda zaman sekarang (mungkin termasuk saya) itu kebanyakan hanya fomo.” (P239)

“Karena saya ingin menggunakan hak pilih untuk mencari pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya, memiliki integritas yang baik, serta pengetahuan seputar dunia politik yang luas. Menurut saya, pemimpin yang memiliki kualitas seperti itu akan membuat Indonesia menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.” (P260)

Ketiga, memperkuat sistem demokrasi (18%). Sebagian partisipan mengungkapkan bahwa motivasi mereka berpartisipasi dalam pemilu adalah memperkuat sistem demokrasi. Penguatan sistem demokrasi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk kecintaan terhadap negara Indonesia. Mereka melihat Pilpres sebagai salah satu sarana terbaik untuk memperkuat demokrasi yang sehat, adil, dan transparan. Dengan demikian, maka hak pilih dipahami sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan rakyat.

“Saya tergerak untuk menggunakan hak pilih karena ini adalah cara konkret untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Dengan memilih, saya bisa menyuarakan nilai dan harapan saya, memastikan pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan publik, dan mendorong perubahan positif.” (P154)

“Sebagai masyarakat Indonesia yang salah satu ciri khasnya adalah negara dengan demokrasi yang baik, hak pilih yang diberi lebih baik digunakan. Memilih adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa nasionalisme, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap bangsa.” (P285)

Keempat, menjalani pengalaman pertama sebagai pemilih pemula (9%). Tidak sedikit partisipan yang termotivasi menggunakan hak pilih karena Pilpres kali ini merupakan pengalaman pertama mereka mengikuti pemilu. Pengalaman pertama ini memberi mereka rasa antusias dan bangga menjadi bagian dari sejarah demokrasi bangsa.

“Karena itu pertama kalinya saya bisa menggunakan hak pilih saya.” (P021)

“Karena pemilu kemarin merupakan pemilu pertama saya, oleh karena itu saya ingin menggunakan suara saya untuk pemilu ini.” (P296)

Kelima, eksternal (5%). Sebagian kecil partisipan terdorong oleh motivasi eksternal, baik itu kekhawatiran akan penyalahgunaan hak suara maupun pengaruh lingkungan sekitar (misal mengikuti arahan orangtua). Meskipun kecil, alasan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk memilih tidak selalu murni berasal dari kesadaran individu, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal.

“Jujur saat itu sedang marak isu tentang jika hak pilih seseorang tidak digunakan dengan baik maka akan digunakan oleh orang lain atau dapat dianggap kecurangan. Maka dari itu, saya menggunakan hak pilih saya.” (P206)

Temuan tentang motivasi berpartisipasi ini senada dengan penelitian sebelumnya (Alfaruqy, 2024), bahwa motivasi partisipasi mahasiswa generasi Z dalam pemilu adalah menunaikan hak dan kewajiban serta memiliki sikap positif tentang pentingnya masa depan bangsa dan pemimpin baru yang baik. Lebih lanjut, motivasi berpartisipasi dalam Pilpres dapat dipahami melalui pemenuhan atas kebutuhan psikologis dasar (Deci & Ryan, 2012). Motivasi mahasiswa

untuk memilih, seperti menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan menyadari pentingnya masa depan dengan memilih pemimpin yang baik, mencerminkan motivasi intrinsik yang mendalam, di mana mereka merasa terdorong untuk terlibat karena tanggung jawab sosial dan pengaruh terhadap perubahan sosial yang lebih besar. Partisipasi ini memenuhi kebutuhan otonomi (*autonomy*), di mana mereka memiliki kontrol terhadap keputusan yang berdampak pada masyarakat, serta kebutuhan keterkaitan (*relatedness*), di mana mereka merasa terhubung dengan masyarakat dan memiliki peran dalam menjaga demokrasi yang sehat.

Alasan Tidak Berpartisipasi

Terdapat 25 dari 500 partisipan menyatakan tidak berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih pada Pilpres. Dari 25 partisipan tersebut ditemukan dua kategori alasan tidak berpartisipasi. Pertama, domisili. Alasan terbanyak berasal dari kendala domisili. Banyak partisipan yang sedang berada di luar kota untuk tujuan pendidikan dan tidak sempat kembali ke daerah asal untuk mencoblos. Meskipun terdapat mekanisme pindah memilih atau pindah TPS, mereka gagal dan/atau memang tidak berusaha memindahkan hak pilih ke tempat tinggal sementara.

“Saya tidak bisa memilih karena tidak ada di domisili saya karena sulitnya pengurusan untuk memilih di domisili yang berbeda.” (P012)

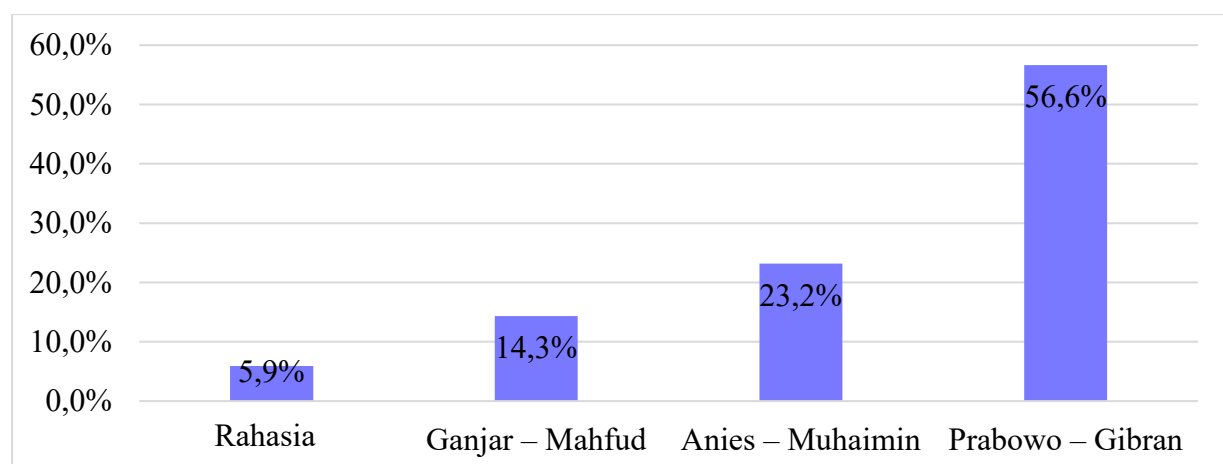
“Anak rantau yang tidak bisa pulang ke kampung halaman.” (P431)

Kedua, sikap terhadap pemilu. Sebagian partisipan tidak memilih karena memiliki sikap negatif terhadap pemilu. Mereka menunjukkan sikap apatis maupun rasa kecewa terhadap politik, sehingga memilih untuk tidak menggunakan hak pilih.

“Menurut saya karena keputusan sebelumnya yang membuat keguncangan dalam stabilitas politik serta kepercayaan saya terhadap pemerintah, saya memilih tidak menggunakan hak pilih saya.” (P168)

Alasan tidak berpartisipasi dalam Pilpres, seperti kendala domisili dan sikap negatif terhadap pemilu, menunjukkan gangguan dalam pemenuhan kebutuhan psikologis dasar (Deci & Ryan, 2012). Kendala domisili menghalangi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan otonomi dan kompetensi, karena mereka merasa tidak memiliki kontrol atau tidak memenuhi syarat formal untuk memilih. Sementara itu, sikap negatif terhadap Pilpres mencerminkan ketidakpuasan terhadap keterkaitan, di mana mereka merasa tidak terhubung dengan proses politik, yang mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi.

Pilihan dalam Pilpres



Grafik 2. Pilihan dalam Pilpres

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas generasi Z memilih pasangan Prabowo-Gibran dengan persentase 56,6%, diikuti dengan pilihan terhadap Anies-Muhaimin sebesar 23,2% dan Ganjar-Mahfud sebesar 14,3%. Sementara, sebesar 5,9% generasi Z merahasiakan pilihannya (lihat Grafik 2). Hasil tersebut selaras dengan hasil Pilpres yang telah dirilis oleh KPU, di mana Prabowo-Gibran memperoleh dukungan terbesar dengan persentase 58,58%, diikuti Anies-Muhaimin sebesar 24,95%, dan Ganjar-Mahfud sebesar 16,47%.

Tingginya persentase generasi Z yang memilih Prabowo – Gibran menarik untuk dicermati lebih lanjut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, salah satu isu yang mendapat atensi publik adalah pengubahan batas usia oleh MK. Pengubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh MK dianggap mengandung muatan politis, di mana Ketua MK merupakan paman cawapres Gibran sekaligus ipar dari Jokowi. Sebanyak 69,4% partisipan menilai pengubahan batas usia tersebut buruk dan sangat buruk (lihat kembali Grafik 1). Hanya 30,6% partisipan yang menilai baik dan sangat baik. Pertanyaannya, mengapa Prabowo-Gibran tetap unggul di kalangan generasi Z yang berstatus sebagai mahasiswa yang dominan menilai keputusan MK buruk bahkan sangat buruk?

Tabel 1. menunjukkan *cross tabulation* partisipan berdasarkan pilihan mereka dan penilaian atas pengubahan batas usia oleh MK. Data menunjukkan bahwa pada pemilih yang menilai pengubahan batas usia oleh MK sebagai hal yang sangat buruk dominan memilih Anies-Muhaimin. Meskipun demikian, cukup banyak yang mendukung Prabowo-Gibran. Sementara itu, pemilih yang menilai pengubahan batas usia sebagai buruk, baik, dan sangat baik dominan memilih Prabowo Gibran. Artinya, meskipun pengubahan batas usia dinilai sebagai sesuatu yang buruk atau sangat buruk, hal tersebut tidak menghalangi mereka memilih pasangan Prabowo-Gibran yang diuntungkan oleh pengubahan batas usia tersebut.

Tabel 1.

Pengubahan Batas Usia oleh MK dan Pilihan Capres-Cawapres

Penilaian atas Pengubahan Batas Usia	Pilihan Capres-Cawapres			Rahasia
	Anies-Muhaimin	Prabowo – Gibran	Ganjar – Mahfud	
Sangat Buruk	14,4%	9,0%	5,6%	2,4%
Buruk	5,0%	22,0%	5,0%	1,6%
Baik	2,0%	21,8%	3,0%	1,6%
Sangat Baik	0,6%	1,0%	0,0%	0,0%

Fenomena ketidaksesuaian antara penilaian negatif terhadap perubahan batas usia oleh MK dan pilihan politik yang tetap mengarah pada pasangan Prabowo-Gibran dapat dijelaskan secara psikologis dengan menggunakan Teori Disonansi Kognitif (*Cognitive Dissonance Theory*). Teori yang dikembangkan Festinger pada tahun 1957 ini berasumsi bahwa individu memiliki keinginan untuk mencapai konsistensi antara sikap dan perilakunya. Inkonsistensi antara sikap dan perilaku akan menyebabkan disonansi kognitif, yang membuat individu merasa tidak nyaman. Individu yang mengalami disonansi akan melakukan upaya sedemikian rupa agar membuat dirinya nyaman kembali atau konsonansi (McGrath, 2017).

Meskipun mayoritas generasi Z menilai bahwa putusan MK sebagai buruk dan sangat buruk, mereka tetap memilih pasangan Prabowo-Gibran yang secara politis diuntungkan oleh putusan itu. Ketidaksesuaian ini menciptakan disonansi psikologis, yang diatasi dengan rasionalisasi atau pembenaran, misalnya menilai Prabowo-Gibran lebih kompeten sebagai pemimpin masa

depan atau lebih sejalan dengan aspirasi politik mereka. Dengan demikian, meskipun putusan MK dinilai negatif, akan tetapi preferensi politik mereka didorong oleh loyalitas terhadap figur yang mereka anggap paling sesuai (Ellemers & Haslam, 2012). Sementara itu, sebagian generasi Z yang menilai baik dan sangat baik putusan MK tidak dapat diragukan lagi pilihan mereka pada Prabowo-Gibran.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan secara optimal, namun ada beberapa keterbatasan pada aspek generalisasi karena partisipan lebih merepresentasikan mahasiswa Generasi Z di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasilnya belum tentu sepenuhnya mencerminkan pola perilaku Generasi Z di provinsi lain atau kelompok pemuda non-mahasiswa. Selain itu, penggunaan survei daring meskipun efisien tetapi berpotensi menimbulkan bias partisipasi dari responden yang lebih aktif secara digital.

KESIMPULAN

Penelitian psikologi politik ini memberikan wawasan penting ikhwal penilaian dan partisipasi politik generasi Z dalam Pilpres 2024. Secara keseluruhan, generasi Z menunjukkan penilaian yang positif terhadap penyelenggaraan Pilpres, meskipun terdapat kritik yang tajam pada tindakan yang dilakukan oleh MK, presiden, dan elite politik. Dalam hal partisipasi, mereka memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi (95%). Hal tersebut mengindikasikan ada kontradiksi dengan kecenderungan partisipasi elektoral generasi Z secara global. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya motivasi intrinsik dalam partisipasi politik, seperti menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan menyadari urgensi masa depan bangsa. Meskipun sebagian besar berpartisipasi, faktor eksternal seperti kendala domisili dan sikap negatif terhadap pemilu berpotensi mempengaruhi partisipasi. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa walaupun terdapat penilaian negatif pada proses awal pencalonan, hal tersebut tidak serta-merta menggoyahkan preferensi politik terhadap figur yang mereka anggap paling sesuai.

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang partisipasi politik generasi Z dengan mengintegrasikan teori psikologi politik, khususnya teori determinasi diri yang menekankan motivasi intrinsik dan kebutuhan psikologis dasar. Partisipasi politik generasi Z lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti rasa tanggung jawab dan keinginan untuk berkontribusi pada masa depan bangsa, daripada pengaruh eksternal. Secara praktis, hasil ini memberikan wawasan penting bagi elite politik untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mengelola, merebut, dan mempertahankan kekuasaan. Penelitian selanjutnya yang ingin melihat gambaran lebih luas, perlu melibatkan partisipan yang mencakup kelompok non-mahasiswa dan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Namun, penelitian yang ingin melihat gambaran lebih dalam, perlu mengombinasikan dengan wawancara mendalam untuk menggali dinamika psikologis dalam pengambilan keputusan politik mereka.

REFERENSI

- Alfaruqy, M. Z. (2023). Political efficacy and political engagement in college students. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 12(2), 239-249. <http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v12i2.10880>
- Alfaruqy, M. Z. (2024). Perilaku politik dan intensi memilih pada mahasiswa: Studi psikologi politik dalam pemilihan gubernur jawa tengah 2024. *Jurnal Empati*, 13(5), 443-455. <https://doi.org/10.14710/empati.2024.48042>
- Amoateng, A. (2015). The end of politics by the youth higher education, youth identity and recession of political participation by South Africa's 'born. *International Journal of*

- African Renaissance Studies*, 10(1), 102–11
<https://doi.org/10.1080/18186874.2015.1050218>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2021). *Hasil sensus penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Barrett, M. & Pachi, D. (2019). *Youth civic and political engagement*. Routledge.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Charta Politika. (2024). *Elektabilitas calon presiden - calon wakil presiden Januari 2024*. Charta Politika.
- Cottam, M. L., Mastors, E., Preston, T., & Dietz, B. (2022). *Introduction to political psychology* (4th ed.). Routledge.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. In P. A. M. V. Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology volume 1* (pp. 416–437). Sage.
- Ellemers, N., & Haslam, S. A. (2012). Social identity theory. In P. A. M. V. Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology volume 2* (pp. 379–398). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446249222.n32>
- Evita, N. (2023). Generasi Z dalam pemilu: Pola bermedia generasi Z dalam pencarian informasi politik. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 47–66. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1051>
- Grehenson, G. (2024, Februari 1). Akademisi UGM sampaikan Petisi Bulaksumur soal dinamika perpolitikan nasional. *Ugm.ac.id*. <https://ugm.ac.id/id/berita/akademisi-ugm-sampaikan-petisi-bulaksumur-soal-dinamika-perpolitikan-nasional/>
- Hamdi, S., Maulana, I., Rahmawadi, I., Fatimatuzzahro. (2024). Drama, manuver dan cawe-cawe politik menjelang pilpres 2024. *Governance*, 10(4), 189–204. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v10i4.221>
- Huddy, L., Sears, D. O., & Levy, J. S. (Eds.). (2013). *The Oxford handbook of political psychology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Indikator Politik (2024). *Peta elektoral di akhir masa kampanye: Satu atau dua putaran?* Indikator Politik.
- Jaspal, R., Carrire, K. R., & Moghaddam, F. M. (2016). Bridging micro, meso, and macro: processes in social psychology. In J. Valsiner, G. Marsico, N. Chaudhary, T. Sato, & V. Dazzani (Eds.), *Psychology as the Science of Human Being* (pp. 265–276). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-21094-0>
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 875 tahun 2023 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024*. Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum. (2025, Februari 10). *KPU luncurkan indeks partisipasi pemilu 2024*. Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12788/kpu-luncurkan-indeks-partisipasi-pemilu-2024>
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 475–507. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475>
- LSI. (2024). *Elektabilitas di masa akhir kampanye dan peluang Pilpres satu atau dua putaran*. LSI.
- Marcus, G. E., Neuman, W. R., & MacKuen, M. (2000). *Affective intelligence and political judgment*. University of Chicago Press.

- McGrath, A. (2017). Dealing with dissonance: A review of cognitive dissonance reduction. *Social and Personality Psychology Compass*, 11(12), e12362. <https://doi.org/10.1111/spc3.12362>
- Muhtadi, B. (2025). Collective memory, democratic ambivalence, and authoritarian notions of democracy: Explaining the rise of Prabowo Subianto. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 0(0), 1–28. <https://doi.org/10.1177/18681034251337763>
- Norris, P. (2009). Political activism: New challenges, new opportunities. In C. Boix & S. C. Stokes (Eds.), *The Oxford handbook of comparative politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199566020.003.0026>
- Pew Research Centre. (2019, Januari 17). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. *Pew Research Centre*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>
- Pontes, A., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2016). Assessing young people's political engagement: A critical and systematic literature review of the instruments used to measure political engagement. *International Politics Reviews*, 4, 55–72. <https://doi.org/10.1057/s41312-016-0002-4>
- Putra, A. M. H., Hendrik, D., & Suryani, N. (2024). The influence of power on decisions Constitutional Court (MK) concerning the age limit for vice presidential candidates in 2023. *Jurnal Hukum Prasada*, 11(1), 37–45. <https://doi.org/10.22225/jhp.11.1.2024.37-45>
- Sokol, B.W. & Marle, P.D. (2019). Civic and faith life in college: A twopart investigation of university students' political and spiritual engagement. *Journal of Student Affairs Research and Practice*, 56:5, 550-563. <https://doi.org/10.1080/19496591.2019.1669454>
- Verba, S., & Nie, N.H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.